

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sajian Data

1. Peran Humas Kabupaten Kendal

Humas Kabupaten Kendal melakukan tugas berdasarkan perintah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan juga undang-undang, pengelolaan website pemerintah oleh bagian humas didasari oleh keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kendal diterapkan sejak pemerintahan berdiri dan terus mengalami perubahan.

Undang-undang tersebut memang menjadi dasar bagi kita, pemerintahan, untuk melaksanakan kegiatan dan program itu dasarnya adalah undang-undang salah satunya adalah undang-undang keterbukaan informasi publik itu. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Sebenarnya sebelum ada undang-undang keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi publik sudah kita laksanakan, sejak pemerintahan berdiri, namun itu kan berproses, artinya keterbukaan mana yang perlu kita buka ke publik dan mana yang tidak, itu memang belum diatur sebelum ada undang-undang tersebut, setelah ada undang-undang nomor 18 ini informasi-informasi apa yang harus disampaikan publik dan mana yang dikecualikan itu diatur, jadi prinsipnya kita sudah melakukan keterbukaan informasi publik lewat media informasi yang ada. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Bagian hubungan masyarakat Kabupaten Kendal dalam pengelolaan website adalah sebagai pihak yang berwenang melakukan publikasi informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Berdasarkan keterangan dari kepala bagian hubungan masyarakat Kabupaten Kendal, humas mempunyai peran internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Internal

Humas mempunyai peran untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kendal, hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antar bagian dalam lingkup pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan ini humas Kabupaten Kendal menggunakan beberapa media seperti:

1) Media elektronik

Koordinasi antar SKPD yang berjalan di Kabupaten Kendal terjalin melalui beberapa fasilitas yang kini telah tersedia diantaranya, Whats App, Facebook, dan Email.

2) Media cetak (surat)

Selain sebagai media publikasi, produk cetak yang dikeluarkan humas yaitu taloid Gelora, tabloid Giat Beribadat, dan majalah Yakin juga berperan sebagai alat untuk menginformasikan perkembangan

penegelolaan pemerintahan kepada seluruh SKPD di Kabupaten Kendal.

3) Rapat rutin

Setiap satu tahun diadakan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS). Rapat ini diadakan pada waktu yang berubah-ubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan, kegiatan ini dihadiri oleh semua perwakilan SKPD yang berada di Kabupaten Kendal.

Fungsi humas sebenarnya ada dua yaitu menjalin komunikasi internal dan eksternal, komunikasi internal humas berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan antar bagian atau segmen dalam internal pemerintah, misalnya bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah kepada pimpinan SKPD, media bisa melalui media-media tidak langsung seperti media elektronik media cetak dan sebagainya, tapi juga melalui media-media langsung tatap muka misalnya rapat, itu adalah komunikasi internal yang harus kita bangun sehingga tujuannya adalah ada harmonisasi antar bagian dalam sistem pemerintah daerah. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

b. Eksternal

Peran eksternal diwujudkan dengan membina hubungan yang baik dengan publik melalui informasi yang secara rutin dipublikasikan menggunakan berbagai media termasuk website. Informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang berkaitan program dan produk pemerintah. Publik yang dimaksud tidak hanya masyarakat umum, akan tetapi juga meliputi pelaku usaha dan organisasi yang berada di wilayah

Kabupaten Kendal, hal ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari publik berkaitan dengan program-program yang telah dicanangkan pemerintah.

Fungsi eksternal humas itu humas mengkomunikasikan atau mengkonekkan antara pemerintah dengan masyarakat secara luas, masyarakat disini bisa publik secara umum, bisa dunia usaha, kemudian organisasi-organisasi yang ada di masyarakat itu harus terkoneksi dengan pemerintah daerah, disinilah fungsi humas mengkomunikasikan, menginformasikan apa kebijakan pemerintah daerah apa kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat, harapannya masyarakat memiliki kepedulian memiliki partisipasi dan mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah daerah. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Subbagian media massa adalah divisi yang bertugas dalam pembaruan berita, hal ini untuk menjaga nilai aktualitas berita sekaligus untuk menunjukkan eksistensi website pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pengelolaan sebuah informasi pegawai media masa secara khusus dibekali dengan kemampuan jurnalistik melalui pelatihan, hal ini juga diterapkan kepada pegawai dari SKPD lain yang bertugas mengisi konten website dalam bentuk berita.

Untuk pegawai humas harus menguasai jurnalistik, untuk SKPD lain yang ada nilai beritanya juga harus menguasai karena ada kaidah-kaidah jurnalistik, tapi kalau hanya berbentuk data berupa statistik saja tidak perlu. (Mokh. Fatkhurahman, Kepala Subbagian Media Massa, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Keseluruhan semua sudah mendapatkan pelatihan tapi waktunya yang berbeda-beda. (Mokh. Fatkhurahman, Kepala Subbagian Media Massa, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

2. Website Kabupaten Kendal

Website adalah salah satu bukti perkembangan teknologi yang tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan komersial semata, instansi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik juga bergerak ke arah modernisasi demi mengikuti permintaan publik, khususnya dalam bidang pelayanan informasi. Website telah menjadi salah satu saluran komunikasi yang dimiliki oleh lembaga negara baik pada level pusat maupun daerah.

Website Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu www.kendalkab.go.id merupakan bukti arus globalisasi, kebutuhan masyarakat akan informasi tidak lagi terbatas ruang dan waktu, hal itulah yang menjadi latar belakang pengadaan sarana komunikasi melalui media baru, khususnya fasilitas website. Baik masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kendal maupun di luar wilayah Kendal dapat dengan mudah mengakses informasi seputar kegiatan pemerintahan yang tengah berjalan melalui media website.

Fasilitas komunikasi ini memang dijadikan salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada publik, selain menggunakan media konvensional. *Up date* informasi seputar dunia pemerintahan menjadi menu utama. Keberadaan website tersebut menjadi tanggung jawab semua instansi pemerintahan Kabupaten Kendal, hal tersebut dikarenakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal mempunyai andil dalam pengisian konten yang dimuat di dalam website tersebut.

a. Pengadaan Website Kabupaten Kendal

Hadirnya website Kabupaten Kendal yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, tepatnya oleh bagian Aplikasi dan Telematika, sedangkan fungsi utamanya dalam memperbaharui informasi seputar kegiatan pemerintahan dijalankan oleh bagian hubungan masyarakat Kabupaten Kendal, Kegiatan pemerintahan Kabupaten Kendal melalui penggunaan media internet ini dilakukan sebagai implementasi dari undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Jadi undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2008 itu memang mengamanatkan bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib menginformasikan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah daerah kepada publik, salah satu saluran untuk menginformasikan adalah melalui website, disamping menggunakan saluran-saluran informasi yang lain termasuk media cetak dan media elektronik seperti radio, televisi disamping media sosial. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Penyebarluasan informasi melalui website adalah implementasi dari undang-undang nomor 18 tahun 2008, dampaknya bagi dinas kominfo adalah pelayanan informasi kepada masyarakat baik informasi yang serta-merta tersedia setiap saat, maupun informasi yang tidak serta-merta, artinya informasi yang tidak dibuka oleh umum atau informasi yang dikecualikan (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Pengadaan website yang dilakukan oleh bidang Aplikasi dan Telematika telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berikut adalah tugas pokok dan fungsi bidang Aplikasi dan Telematika berdasarkan data yang diambil dari berkas resmi Dinas Komunikasi dan Informatika:

- 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang telematika, perangkat lunak, aplikasi sistem informasi, perangkat keras dan jaringan;
- 2) Pengordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang telematika, perangkat lunak, aplikasi sistem informasi, perangkat keras dan jaringan;
- 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang telematika, perangkat lunak, aplikasi sistem informasi, perangkat keras dan jaringan; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang telematika, perangkat lunak, aplikasi sistem informasi, perangkat keras dan jaringan.

Website pemerintahan yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal didasarkan atas surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian menentukan domain yang digunakan di setiap daerah, dan untuk Kabupaten Kendal menggunakan domain www.kendalkab.go.id, berdasarkan keterangan dari kepala bagian seksi telematika Kabupaten Kendal, website juga didasarkan pada perintah lisan bupati yang menghendaki penggunaan website sebagai salah satu saluran komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ada mandat dari kementerian kominfo berupa surat edaran, tapi yang jelas semua Kabupaten Kota harus memiliki memiliki portal atau website, ada juga mandat dari bupati dalam bentuk perintah lisan (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinass Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Website Kabupaten Kendal adalah salah satu aset milik pemerintah yang membutuhkan pertanggung jawaban, keberadaan website ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal baik teknis maupun non teknis. Selain itu pengadaan website juga berdasarkan atas dasar hukum yang telah ditentukan baik kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan data yang diambil dari berkas resmi Dinas Komunikasi dan Informatika berikut ini adalah dasar hukum pengadaan website Kabupaten Kendal:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) ;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;

- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor 08/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (*IT Governance*) ;

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan website Kabupaten Kendal secara umum adalah untuk membangun komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, agar komunikasi dapat berjalan dengan interaktif maka dibuat sebuah saluran komunikasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan murah.

Berdasarkan dokumen dari Dinas Kominfo Kabupaten Kendal, tujuan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1) Menampilkan profil dari pemerintah Kabupaten Kendal yang meliputi geografis, sosial dan masyarakat, juga instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal.

- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menuju ke arah keterbukaan (transparansi).
- 3) Lebih memperkenalkan masing-masing instansi dari sisi sumberdaya manusia dan wilayah kewenangan maupun tugas pokok dan tanggung jawab kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar kabupaten Kendal.
- 4) Memperkenalkan potensi di daerah kabupaten Kendal untuk masyarakat secara luas.
- 5) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah sebagai pengelola Kabupaten Kendal dengan masyarakat umum.
- 6) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sasaran website Kabupaten Kendal adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kendal, baik yang berada di wilayah Kabupaten Kendal maupun yang di luar wilayah Kabupaten Kendal. Tidak ada batasan usia dalam penentuan sasaran website ini, karena konten website berisi informasi umum yang berhak diketahui oleh semua masyarakat.

Tujuan dibuatnya website adalah agar komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan interaktif, sehingga akan membangun kedekatan antara dua pihak. Kemudian untuk sasaran website Kabupaten Kendal adalah seluruh masyarakat Kendal baik yang ada di Kendal maupun yang diluar Kendal. (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinass Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

c. Tim Website Kabupaten Kendal

Keberadaan website sebagai salah satu saluran komunikasi pemerintah adalah faktor pendukung untuk mewujudkan pemerintahan modern yang berbasis elektronik, dalam upaya menuju *good governance*, hal membuat pengelolaan website menjadi suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan karena pengadaan dan pengelolaannya membutuhkan biaya. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk sebuah tim yang managani pengelolaan website agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diambil dari berkas resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Berikut ini adalah tabel susunan tim website pemerintah Kabupaten Kendal:

Penasehat : Bupati Kendal

Pengarah : Wakil Bupati Kendal

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi Telematika pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Anggota 1 : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Kendal

Anggota 2 : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

- Anggota 3 : Kepala Seksi Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
- Anggota 4 : Kepala Seksi Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
- Anggota 5 : Kepala Seksi Perangkat Keras dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
- Anggota 6 : Kepala Subbagian Media Massa pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
- Anggota 7 : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
1. Santi Rusiyana
 2. Arif Setiyono
 3. A. Syahrul F.
 4. Khaerul Hidayat
 5. Arif Cahyono
 6. Triyono Fajar
- Anggota 8 : Staf Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
1. Agung Raharjo
 2. Heri Budhi S.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan website melibatkan dua SKPD yaitu Dinas Kominfo dan bagian humas. Dalam pengelolaanya dibutuhkan koordinasi antara kedua pihak agar penggunaan website efektif sebagai media penyebarluasan informasi, sebagai wujud transparansi dan sarana untuk mengedukasi publik tentang sistem dan kegiatan pemerintahan.

d. Pengisian Konten Website Kabupaten Kendal

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika pengisian konten website pemerintah Kabupaten Kendal ditangani oleh bagian Sarana Komunikasi dan Pembinaan, berikut adalah tugas pokok dan fungsi bagian Sarana Komunikasi dan Pembinaan:

- 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sarana komunikasi, diseminasi informasi, pengawasan, pembinaan, dan pengaduan;
- 2) Pengordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang sarana komunikasi, diseminasi informasi, pengawasan, pembinaan, dan pengaduan;
- 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang sarana komunikasi, diseminasi informasi, pengawasan, pembinaan dan pengaduan; dan

- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sarana komunikasi, diseminasi informasi, pengawasan, pembinaan dan pengaduan

Namun dalam praktek yang terjadi di lapangan tugas pengelolaan konten website dirangkap oleh bagian Aplikasi dan Telematika sebagai pihak penyedia sarana website. Hal ini menunjukkan terjadinya overlap tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap SKPD diberi akses untuk mengisi website tetapi atas persetujuan pembantu PPID, sekretaris biasanya yang ditunjuk, sekretaris masing-masing dinas, jadi tanggung jawab isinya ada pada pembantu PPID (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinass Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Setiap Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal mulai dari SKPD yang berada di area Sekretariat Daerah, badan-badan kedinasan hingga kecamatan diberi amanat untuk mengisikan informasi melalui website berkaitan dengan kegiatan pemerintahan sesuai dengan wewenangnya. Di setiap SKPD terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) yang bertugas untuk menentukan Petugas Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi (PPTIK) sebagai perwakilan pengelola website di setiap SKPD yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari sekretaris SKPD terkait, sehingga terdapat individu yang khusus menangani pengisian konten website.

Berdasarkan berkas resmi Dinas kominfo tentang konten SKPD berikut ini adalah pihak yang mengisi konten website sesuai dengan satuan kerjanya:

Tabel 2.1

Sekretariat Daerah

Nama SKPD	Waktu Update
Bagian Tata Pemerintahan	6 Bulan
Bagian Hukum	6 Bulan
Bagian Humas	Setiap Hari Kerja
Bagian Administrasi Pembangunan	6 Bulan
Bagian Perekonomian dan SDA	6 Bulan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	6 Bulan
Bagian Organisasi	6 Bulan
Bagian Umum	6 Bulan
Bagian Administrasi Keuangan	6 Bulan
Sekretariat DPRD	6 Bulan

Table 2.2

Lembaga Lain

Nama Lembaga	Waktu Update
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6 Bulan
Kantor Satpol PP	6 Bulan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten	6 Bulan

Table 2.3

Dinas Daerah

Nama SKPD	Waktu Update
Dinas Pendidikan	6 Bulan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6 Bulan
Dinas Pemuda dan Olahraga	6 Bulan
Dinas Kesehatan	6 Bulan
Dinas Bina Marga Sumber daya Air Energi	6 Bulan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	6 Bulan
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	6 Bulan
Dinas Perhubungan	6 Bulan
Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Bulan
Dinas Kependudukan dan Capil	6 Bulan
Dinas Sosial	6 Bulan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6 Bulan

Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Bulan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 Bulan
Dinas Koperasi, UMKM	6 Bulan
DPPKAD	6 Bulan

Table 2.4

Lembaga Teknis

Nama SKPD	Waktu Update
Badan Perencana Pembangunan Daerah	6 Bulan
Inspektorat	6 Bulan
Badan Kepegawaian Daerah	6 Bulan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6 Bulan
Badan Pemberdaya Perempuan dan KB	6 Bulan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	6 Bulan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	6 Bulan
Badan Lingkungan Hidup	6 Bulan
RSUD Dr. H Soewondo	6 Bulan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6 Bulan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	6 Bulan

Table 2.5

Kecamatan

Nama Kecamatan	Waktu Update
Kecamatan Kendal Kota	6 Bulan
Kecamatan Patebon	6 Bulan
Kecamatan Brangsong	6 Bulan
Kecamatan Kaliwungu	6 Bulan
Kecamatan Cepiring	6 Bulan
Kecamatan Gemuh	6 Bulan
Kecamatan Pegandon	6 Bulan
Kecamatan Kangkung	6 Bulan
Kecamatan Weleri	6 Bulan
Kecamatan Rowosari	6 Bulan
Kecamatan Pageruyung	6 Bulan
Kecamatan Sukorejo	6 Bulan
Kecamatan Plantungan	6 Bulan
Kecamatan Limbangan	6 Bulan
Kecamatan Singorojo	6 Bulan
Kecamatan Boja	6 Bulan
Kecamatan Patean	6 Bulan
Kecamatan Ringin Arum	6 Bulan
Kecamatan Ngampel	6 Bulan
Kecamatan Kaliwungu Selatan	6 Bulan

Table 2.6

Perusahaan Daerah

Nama Perusda	Waktu Update
PD. Farmasi	6 Bulan
PD.BPR BKK Kendal	6 Bulan
PD.BPR Kendali Artha	6 Bulan
PD. BKK Kendal Kota	6 Bulan
PDAM Tirto Pangguripan	6 Bulan
PD. Aneka Usaha	6 Bulan

Table 2.7

Organisasi

Nama Organisasi	Waktu Update
PKK	6 Bulan
Dharma Wanita	6 Bulan
SAR	6 Bulan
Komisi Penanggulangan AIDS	6 Bulan
Larasati	6 Bulan

Sumber: Dokumen Kominfo Kabupaten Kendal

e. Konten Website Pemerintah Kabupaten Kendal

Sebagai sebuah sarana komunikasi kepada masyarakat konten website pemerintah dituntut untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan berikut adalah konten-konten yang terdapat pada website pemerintah Kabupaten Kendal:

1) Beranda

Beranda adalah halaman awal yang menggambarkan seluruh isi website Kabupaten Kendal.

Gambar 8

Beranda website Kabupaten Kendal



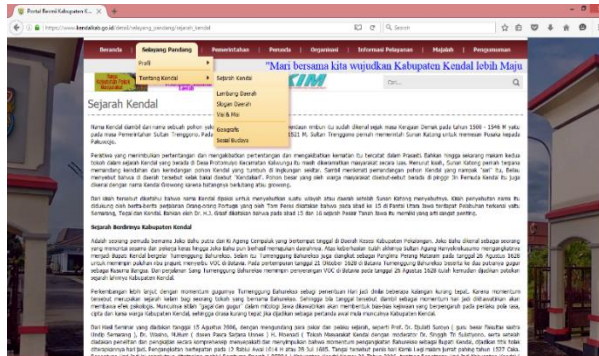
Sumber: www.kendalkab.go.id

2) Selayang Pandang

Selayang pandang adalah menu yang berisi profil dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal, selain itu informasi yang berkaitan tentang Kendal dijabarkan melalui sejarah Kabupaten Kendal, lambang daerah, slogan daerah, visi & misi, kondisi geografis serta kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kendal.

Gambar 9

Selayang pandang Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

3) Pemerintahan

Menu pemerintahan berisi alat kelengkapan pemerintah daerah, yaitu lembaga eksekutif yang berisi instansi yang berada di area sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis, lembaga lain dan kecamatan. Sementara untuk lembaga legislatif berisi anggota DPRD, anggota komisi dan kelengkapan DPRD

Gambar 10

Link Pemerintahan Website Kabupaten Kendal



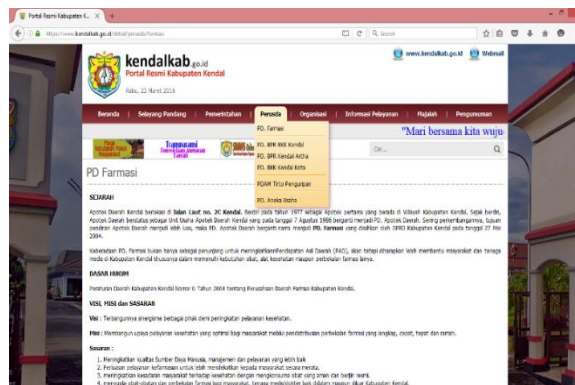
Sumber: www.kendalkab.go.id

4) Perusahaan Daerah

Terdapat beberapa perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal dan dijelaskan dalam website, perusahaan daerah yang dimiliki diantaranya PD. Framasi, PD. BPR BKK Kendal, PD. BPR Kendali Artha, PD. BKK Kendal Kota, PDAM Tirta Penguripan dan PD. Aneka Usaha.

Gambar 11

Link Perusda Website Kabupaten Kendal



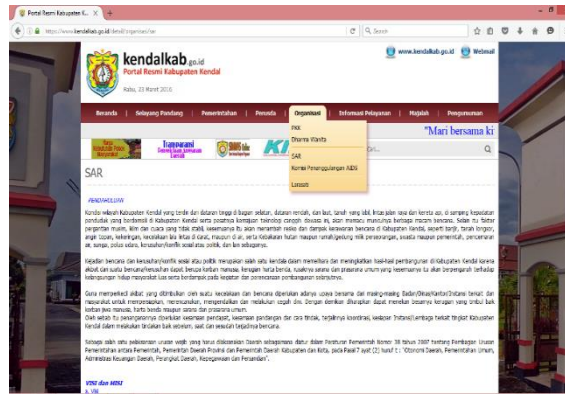
Sumber: www.kendalkab.go.id

5) Organisasi

Pada menu ini dijelaskan berbagai organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, SAR, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Larasati

Gambar 12

Gambar Link Organisasi Website Kabupaten Kendal



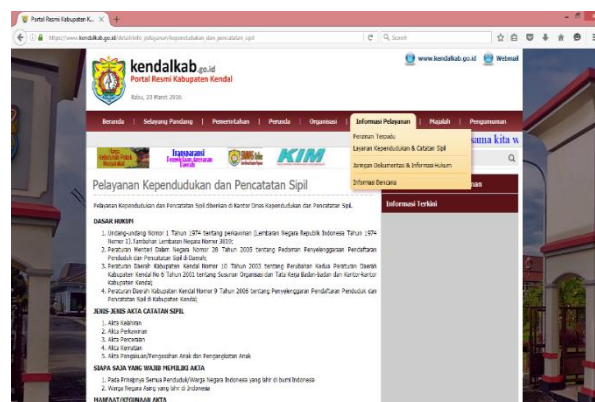
Sumber: www.kendalkab.go.id

6) Informasi Pelayanan

Berisi berbagai pelayanan diantaranya Perizinan Terpadu, Layanan Kependudukan & Catatan Sipil, Penggunaan Fasilitas Umum, Perijinan Bidang Perijinan, Pelayanan RSUD, Keuangan Daerah, Sanitasi, Bantuan Langsung, dan PNPM Mandiri

Gambar 13

Link Informasi Pelayanan Website Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

7) e-Majalah

Majalah yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal tidak hanya dalam bentuk *hardcopy*, namun juga diunggah melalui website, terdapat dua majalah yang dapat diakses yaitu majalah Yakin dan tabloid Gelora

Gambar 14

Link e-Majalah Website Kabupaten Kendal



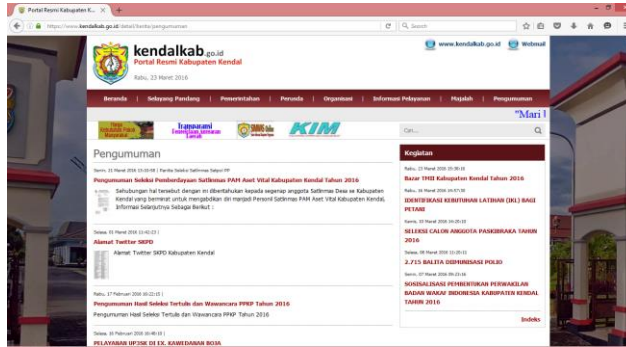
Sumber: www.kendalkab.go.id

8) Pengumuman

Menu pengumuman berisi seputar informasi yang berhubungan dengan produk pemerintah, lowongan pekerjaan dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan operasional pemerintah

Gambar 15

Link Pengumuman Website Kabupaten Kendal



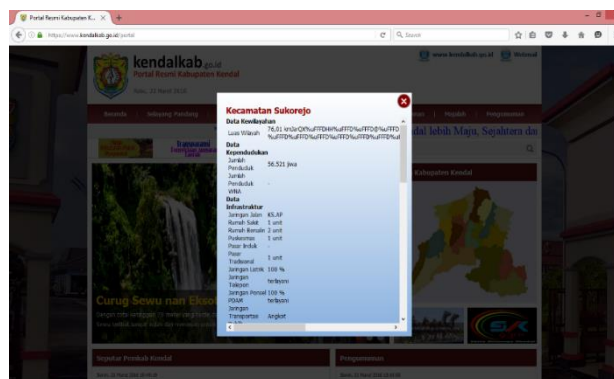
Sumber: www.kendalkab.go.id

9) Peta Kabupaten

Peta kabupaten yang dimuat di website Kabupaten Kendal digambarkan dalam bentuk geografis dan dipisahkan berdasarkan kecamatan, setiap link kecamatan dapat dibuka dan berisi informasi seputar kecamatan tersebut

Gambar 16

Link Peta Website Kabupaten Kendal



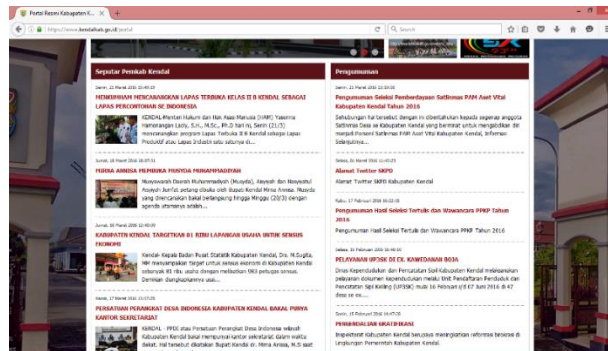
Sumber: www.kendalkab.go.id

10) Seputar Pemkab Kendal

Menu ini adalah sajian utama dalam website, memuat berbagai macam berita terkait pemerintahan Kabupaten Kendal yang terus diperbarui

Gambar 17

Link Berita Website Kabupaten Kendal



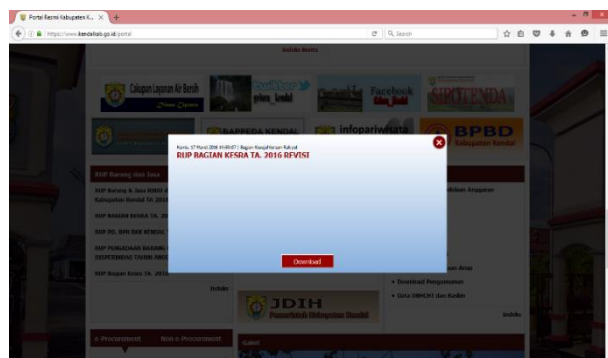
Sumber: www.kendalkab.go.id

11) RUP Barang dan Jasa

Berisi informasi seputar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal, informasi di dalamnya berbentuk file yang dapat di download

Gambar 18

Link RUP Barang dan Jasa Website Kabupaten Kendal



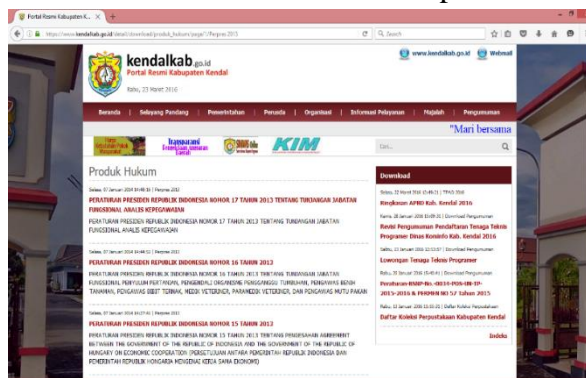
Sumber: www.kendalkab.go.id

12) Produk Hukum

Produk hukum adalah salah satu menu yang sangat penting, karena berfungsi sebagai media untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Gambar 19

Link Produk Hukum Website Kabupaten Kendal



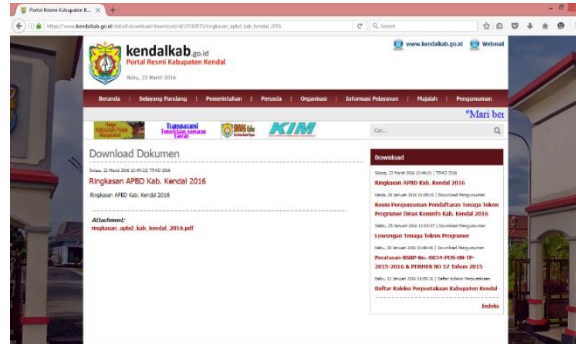
Sumber: www.kendalkab.go.id

13) Download

Adalah sebuah layanan yang berfungsi memberikan informasi berupa dokumen berbagai macam produk pemerintah yang dapat diunduh untuk diketahui oleh publik

Gambar 20

Link Download Website Kabupaten Kendal



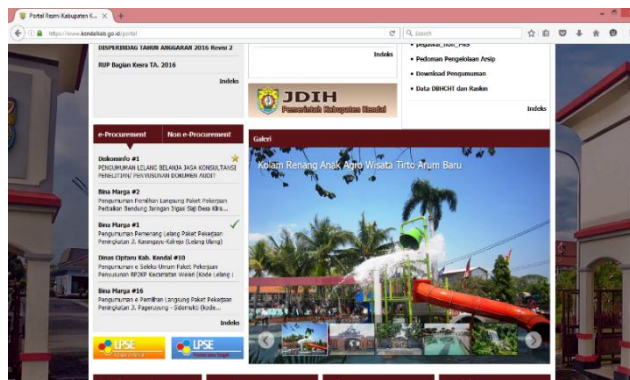
Sumber: www.kendalkab.go.id

14) *e-Procurement* dan *Non e-procurement*

Sebuah publikasi melalui pengumuman yang berisikan informasi tentang berbagai lelang yang dilakukan oleh pemerintah

Gambar 21

Link *e-Procurement* dan *Non e-procurement*



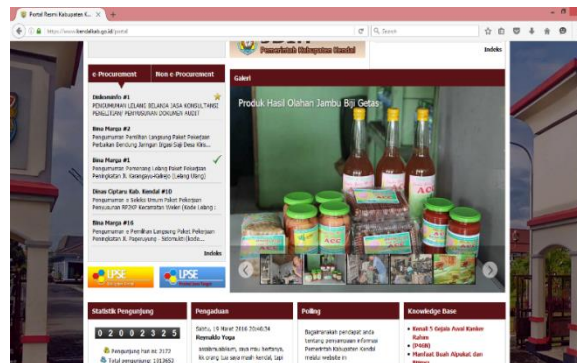
Sumber: www.kendalkab.go.id

15) Galeri

Galeri adalah menu yang memuat berbagai macam gambar dan foto objek yang berada di wilayah Kabupaten Kendal

Gambar 22

Link Galeri Website Kabupaten Kendal



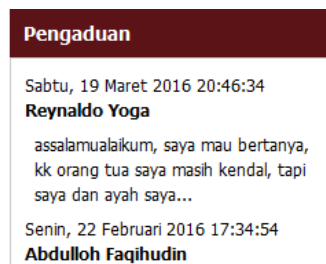
Sumber: www.kendalkab.go.id

16) Pengaduan

Dalam website Kabupaten Kendal pemerintah menyediakan sarana untuk berkomunikasi dua arah dengan publik, caranya adalah dengan memberikan kolom pengaduan yang dapat diisi oleh publik, dengan terlebih dahulu harus mengisi form pengaduan

Gambar 23

Link Pengaduan Website Kabupaten Kendal



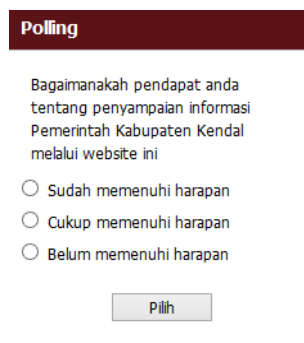
Sumber: www.kendalkab.go.id

17) Polling

Menu ini merupakan survei yang dilakukan pemerintah melalui website berkaitan dengan kepuasan publik dengan penyampaian informasi melalui situs website

Gambar 24

Link Polling Website Kabupaten Kendal



Polling

Bagaimanakah pendapat anda tentang penyampaian informasi Pemerintah Kabupaten Kendal melalui website ini

Sudah memenuhi harapan

Cukup memenuhi harapan

Belum memenuhi harapan

Pilih

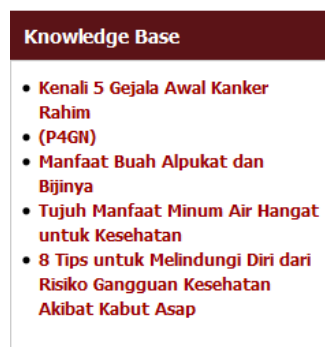
Sumber: www.kendalkab.go.id

18) Knowledge Base

Berisi tentang artikel yang membahas seputar ilmu pengetahuan sebagai sarana pendidikan bagi publik

Gambar 25

Link Knowledge Base Website Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

19) Statistik Pengunjung

Menu ini adalah sebuah papan informasi yang menunjukkan intensitas penggunaan website oleh publik, sehingga dapat diketahui seberapa banyak orang yang mengakses website pemerintah setiap hari

Gambar 26

Link Statistik Pengunjung Website Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

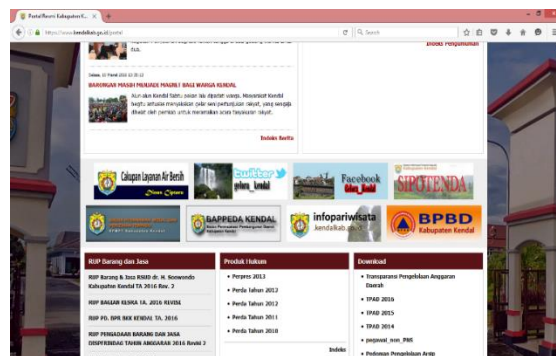
20) Menu Tambahan

Situs tambahan yang memuat informasi seputar pemerintah Kabupaten Kendal seperti Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Sistem Informasi Pengawasan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kendal, Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kendal, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kendal dan Jawa Tengah, Akun Twitter dan Facebook Majalah Gelora. Selain berbagai menu layanan website yang telah dijelaskan diatas, website pemerintah Kabupaten Kendal juga menyediakan link lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintah

seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kendal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta link www.indonesia.go.id

Gambar 27

Link Menu Tambah Website Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi telematika, informasi yang dimuat dalam website Kabupaten Kendal telah sesuai dengan instruksi Kementerian, akan tetapi jika dilihat dari sisi desain memang berbeda dengan apa yang telah ditentukan, hal ini dilakukan atas

dasar masukan yang berasal dari SKPD, masyarakat dan pimpinan daerah agar tampilan website tidak terlihat kaku.

Dulu kita pernah membuat sesuai standar seperti itu tetapi kalau kita buat standar seperti itu kelihatan kaku karena di sebelah kanan kiri ada foto bupati dan wakil bupati, dulu kita juga sempat membuat rancangan seperti itu tapi dengan adanya usulan dari masyarakat usulan dari SKPD termasuk usulan dari pak pj bupati, maka dari itu kita ganti, memang sekarang tidak sesuai standar tapi dulu memang pernah, tapi kalo standar baku itu kita laksanakan secara desain kaku, cuma yang penting dari instruksi kementerian soal informasi sudah kita laksanakan, secara konten lengkap namun secara desain tidak sesuai (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

f. SOP Pengisian Konten Website Kabupaten Kendal

Dalam setiap penggunaan sarana yang dimiliki pemerintah ditentukan pula cara-cara pengoperasian sarana tersebut, atau yang biasa disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam pengelolaan website ini ditetapkan SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penetapan SOP ini bertujuan agar penggunaan website sebagai media penyebarluasan informasi publik berfungsi secara maksimal. Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan SOP berkaitan dengan pengelolaan website, Pengisian konten website pemerintah Kabupaten Kendal dilakukan berdasarkan SOP Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 01/TELE/KOMINFO/2013. Dalam SOP tersebut terdapat sembilan tahapan yang harus dilakukan dalam pengisian konten website, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pembaruan informasi:

1) Pengumpulan materi

Pengumpulan materi yang dilakukan oleh humas dilaksanakan oleh pegawai subbagian media massa, berdasarkan SOP yang berlaku materi yang didapatkan harus memenuhi syarat yaitu data, tabel, dan gambar dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Waktu untuk pencarian materi dibatasi selama satu hari, hal ini bertujuan agar informasi yang dimuat di website selalu aktual.

2) Koreksi Materi

Dalam SOP disebutkan bahwa setiap materi yang telah didapatkan oleh para pegawai harus melewati koreksi kepala subbagian media massa sebagai redaktur, koreksi materi dilakukan selama 30 menit. Namun dalam praktek dilapangan setiap materi yang didapatkan oleh pegawai media massa tidak dilakukan koreksi oleh kepala subbagian, berdasarkan wawancara dengan kepala sub bagian media massa hal ini dilakukan karena para pegawai dinilai telah mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan sebuah informasi untuk dimuat di dalam website.

3) Persetujuan Materi

Setelah dilakukan koreksi oleh kepala subbagian media massa langkah selanjutnya adalah penyerahan materi kepada kepala bagian humas untuk mendapatkan persetujuan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan materi, hal ini dilakukan selama 30 menit. Namun tahapan

ini juga tidak dilaksanakan demi mempersingkat birokrasi agar menghasilkan berita yang aktual.

4) Mengolah Data

Tahapan selanjutnya adalah pegawai media massa menuliskan paragraf berita berdasarkan materi yang telah didapatkan, tahap ini dibatasi oleh waktu selama 15 menit. hal ini didasarkan atas perintah langsung dari kepala bagian humas. Dalam prakteknya penulisan berita dilakukan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, hal ini tentu mengurangi nilai aktualitas berita.

5) Membuka Website

Sesaat sebelum dilakukan pengelolaan data dalam website terlebih dahulu pegawai harus membuka portal resmi milik pemerintah Kabupaten Kendal yaitu www.kendalkab.go.id. Pegawai selanjutnya akan memasukkan *user name* dan *password* sebagai salah satu syarat pengisian konten, setiap pegawai media massa yang berwenang melakukan pembaruan informasi diberi *user name* dan *password* yang telah ditentukan.

6) Mengedit Artikel

Sebelum berita diupload terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan guna meminimalisasi kesalahan penulisan, pegawai media massa diberi kesempatan baik untuk menambah maupun mengurangi artikel agar berita yang dipublikasikan efektif dan mudah dimengerti oleh pembaca.

7) Mengupload Berita

Berita yang telah melewati serangkaian tahap penulisan dan pemeriksaan kemudian di *upload* dalam website, hal ini dilakukan langsung oleh pegawai media massa yang mencari dan mengolah materi.

8) Konsumsi Berita

Informasi yang telah berhasil di upload dapat langsung dilihat oleh masyarakat luas baik yang berada di Kendal maupun yang berada di luar wilayah Kendal, *up date* berita melalui website juga sekaligus berfungsi sebagai *press release* sehingga wartawan yang hendak mengetahui perkembangan berita seputar pemerintahan Kendal bisa langsung mengambil informasi dari sumber yang terpercaya, yaitu portal resmi pemerintah Kabupaten Kendal.

9) Dokumentasi

Tahapan terakhir dalam pembaruan berita yang dilakukan oleh humas adalah pencatatan oleh pegawai media massa, terkait perberitaan yang telah dilakukan sebagai sebuah arsip yang dapat digunakan jika dibutuhkan di waktu yang akan datang.

Tabel 3

Tabel SOP Pengisian Konten Website

NO	AKTIVITAS	PUBLIK	STAF TEKNIS/ TIM WEBSITE	KABID/ KASUBA G/ KASIE	KEPALA SKPD / SEKRETA- RIS	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1.	Pengumpulan materi/bahan isi konten untuk website					Data, tabel, foto, gambar baik softcopy /hardcopy	1 hari	Materi/bahan untuk website.	
2.	Koreksi materi/bahan konten layak tayang di website.					Data, tabel, foto, gambar baik softcopy /hardcopy	30 Menit		
3.	Menyetujui bahan/materi yang telah diseleksi.					Data, tabel, foto, gambar baik softcopy /hardcopy	30 Menit		
4.	Mengolah data/bahan menjadi informasi dalam bentuk konten website.					Lembar Disposisi Kepala Dinas	15 Menit	Dasar Pelaksanaan tugas dalam mengupload berita.	
5.	Membuka website Kendalkab.go.id dan mengisi user, password .					Komputer, Jaringan	5 Menit		
6.	Memilih menu menulis, menambah, mengedit artikel					Komputer, Jaringan	15 Menit	Penempatan berita sesuai dengan kategori berita.	
7.	Mengupload dan publis konten.					Komputer, Jaringan, Snalhektter	5 Menit	Pengisian Berita pada website.	
8.	Berita /konten dapat dilihat/dibaca publik.					Komputer, Jaringan	5 Menit	Berita.	
9.	Mendokumentasikan.					Snalhakter, filling Kabinet	5 Menit	Arsip.	

Sumber: Dokumen Dinas Kominfo Kabupaten Kendal

Peralatan/perengkapan pengisian konten website:

- 1) Komputer
- 2) Jaringan komputer

Kualifikasi pelaksana pengisian konten website:

- 1) Memahami jurnalistik
- 2) Mampu mengopersikan komputer
- 3) Memahami estetika pengelolaan website

g. Kolom Pengaduan Website Kabupaten Kendal

Website pemerintah Kabupaten Kendal menyediakan fasilitas komunikasi dua arah yang bernama kolom pengaduan, hal ini telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan standar konten yang harus ada dalam sebuah website milik lembaga pemerintah, termasuk website milik pemerintah daerah, berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 maret 2016 dengan Heri Aryanto selaku kepala bidang seksi telematika fasilitas ini dibuat dengan tujuan agar komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan interaktif. Kolom pengaduan ditempatkan di bagian bawah website. Untuk dapat mengirimkan pengaduan melalui website pihak pengadu diharuskan mengisi formulir yang disediakan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan formulir yang harus diisi adalah sebagai berikut:

- 1) Nama pengadu
- 2) Nomor Kartu Tanda Penduduk
- 3) Email
- 4) Alamat Pengadu
- 5) Nomor Telepon

Setiap pesan pengaduan yang diterima oleh pihak pengelola, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum akhirnya mendapatkan jawaban. Pesan aduan

yang dikirimkan terdiri dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, infrastruktur, ketenagakerjaan, keamanan dan saluran komunikasi. Pihak pengelola pengaduan tentu tidak serta-merta dapat menjawab pengaduan yang menjadi wewenang dari SKPD lain, maka dari itu dibentuk sebuah koordinasi antar SKPD untuk menjawab setiap aspirasi yang disampaikan publik. berikut adalah tahapan pengelolaan pesan pengaduan:

- 1) Pengiriman pesan pengaduan
- 2) Penerimaan pesan pengaduan
- 3) Pengiriman pesan aduan kepada SKPD terkait
- 4) Penerimaan jawaban pesan aduan dari SKPD terkait
- 5) Pengiriman jawaban

Dalam prakteknya kolom pengaduan yang disediakan melalui website belum berfungsi seperti yang diharapkan, hal tersebut terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat yang melakukan pengaduan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan faktor penyebab permasalahan tersebut, yaitu:

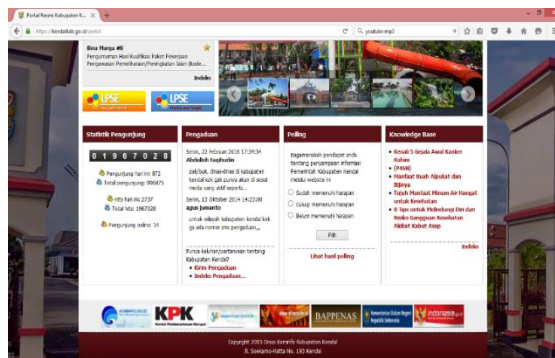
- 1) Penempatan Kolom Pengaduan

Posisi kolom yang berada di bagian bawah website, berpengaruh terhadap animo masyarakat yang rendah terhadap pemanfaatan kolom pengaduan sebagai salah satu sarana komunikasi dengan pihak pemerintah.

Saya tidak pernah melihat adanya kolom pengaduan, saya cuma baca berita yang ada di atas saja, malah tidak menyadari kalo ada kaya kolom pengaduan. (Muhammad Arif Prayoga, Masyarakat Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 maret 2016)

Gambar 28

Kolom pengaduan yang berada di bagian bawah website



Sumber: www.kendalkab.go.id

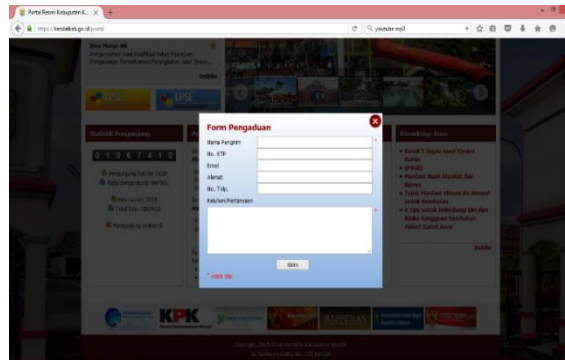
2) Persyaratan Pengiriman Pengaduan

Sebelum masyarakat dapat mengirimkan pesan pengaduan melalui kolom yang tersedia di website, terlebih dahulu diharuskan mengisi formulir sebagai persyaratan seperti, nama pengadu, nomor kartu tanda penduduk, email, alamat, dan nomor telepon.

Sedikit banyak memang itu membuat masyarakat jadi enggan untuk melakukan pengaduan, karena tidak semua masyarakat kendal punya email, tapi kita juga sudah coba memperbaikinya dengan menghilangkan pengisian nomor KTP, jika ternyata masih ada nanti coba kami periksa lagi. (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

Gambar 29

Formulir syarat pengiriman pesan pengaduan



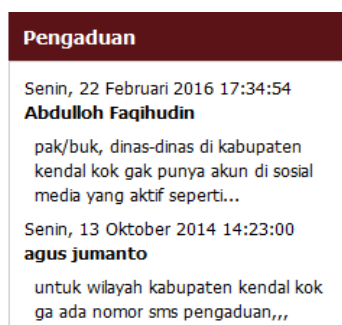
Sumber: www.kendalkab.go.id

3) Ukuran Kolom Pengaduan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tampilan kolom pengaduan yang dimiliki oleh website pemerintah Kabupaten Kendal terlalu kecil sehingga banyak pengunjung yang tidak menyadari keberadaan kolom tersebut.

Gambar 30

Tampilan kolom pengaduan



Sumber: www.kendalkab.go.id

4) Respon Lambat

Respon yang diberikan oleh SKPD terkait dengan pesan aduan yang dikirimkan terlalu lambat karena harus melewati birokrasi yang panjang. Sehingga pengaduan yang seharusnya dapat secepat mungkin mendapatkan tanggapan belum dapat diberikan pernyataan balasan dari pemerintah.

Saat ini memang ada permasalahan dari SKPD, pertanyaan yang kita berikan kesana responnya kurang cepat (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

5) Tidak Ada Surat Perintah Dari Pimpinan

Koordinasi yang berjalan kurang baik antara pihak Dinas Kominfo dan SKPD terkait dengan pengaduan masyarakat disebabkan karena belum adanya perintah resmi dari pimpinan daerah untuk segera memberikan jawaban terhadap setiap pengaduan, sehingga pesan pengaduan yang diterima cenderung dikesampingkan karena kesibukan dengan tugas wajib lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

Memang dibutuhkan surat kebijakan dari pimpinan, jadi nanti kita buat surat edaran atau Perbub kaitannya dengan pengaduan itu, supaya SKPD merespon, selama ini tidak ada surat dari bupati untuk segera merespon, dengan adanya kebijakan itu mereka akan segera merespon (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

h. Rapat Koordinasi Website Kabupaten Kendal

1) Rapat Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam jangka waktu tiga bulan sekali Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan rapat umum internal yang membahas program-program yang dijalankan, dalam kegiatan ini juga dilakukan pembahasan tentang kinerja pengelolaan website. Hasil dari rapat ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan website Kabupaten Kendal.

2) Rapat Koordinasi PPTIK

Rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap enam bulan ini secara khusus membahas tentang pengelolaan website selama kurun waktu enam bulan terakhir, hal ini juga bertujuan sebagai program evaluasi demi memperbaiki kualitas pelayanan informasi, rapat ini dihadiri oleh petugas pembantu teknologi informasi dan komunikasi dari setiap SKPD yang bertugas sebagai perwakilan pengelola website dari masing-masing instansi.

i. Perbedaan Website Kabupaten Kendal pada Tahun 2012 Hingga 2015

Penggunaan website sebagai salah satu sarana publikasi dilakukan sebagai penyesuaian terhadap berkembangnya teknologi informasi, dalam praktiknya pemerintah Kabupaten Kendal juga melakukan pembaruan terhadap layanannya melalui website. Tampilan dan konten

website mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 demi memenuhi kebutuhan informasi yang lebih lengkap tanpa mengabaikan aspek tampilan visual sebagai salah satu daya tarik, perubahan tersebut adalah:

1) Website Tahun 2012

Gambar 31

Tampilan bagian atas website Kabupaten Kendal tahun 2012



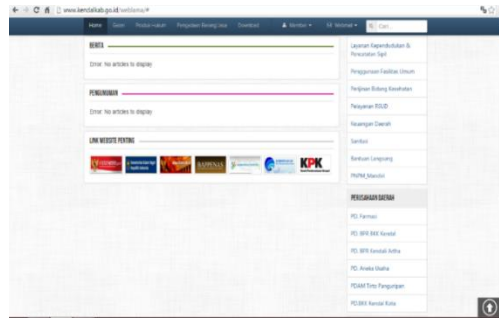
Sumber: <http://www.kendalkab.go.id/weblama/#>

Tampilan website Kabupaten Kendal pada tahun 2012 masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu dengan menempatkan foto pimpinan dan wakil pimpinan daerah yang ditempatkan pada bagian atas website. Secara visual website didominasi oleh warna putih dan biru. Pada bagian atas website juga dilengkapi dengan indikator suhu udara dan peta, namun pada link peta hanya menunjukkan letak Kabupaten Kendal dalam lingkup wilayah jawa tengah saja tanpa menunjukkan detail kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Pilihan

menu belum tertata dengan rapi, selain itu pada kolom berita dan bagian bawah website terdapat ruang kosong.

Gambar 32

Tampilan bagian bawah website Kabupaten Kendal tahun 2012



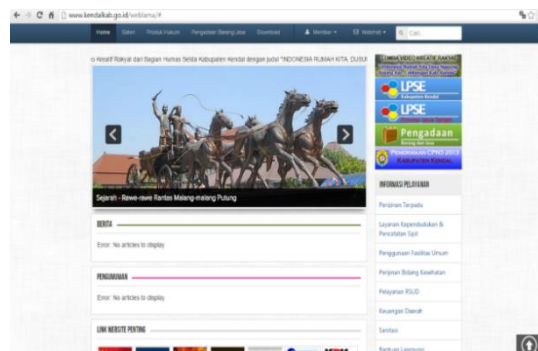
Sumber: <http://www.kendalkab.go.id/weblama/#>

2) Website Tahun 2013

Tidak ada perubahan yang mencolok pada tampilan website di tahun 2013, secara keseluruhan desain website masih sama dengan desain tahun sebelumnya.

Gambar 33

Tampilan website Kabupaten Kendal tahun 2013



Sumber: <http://www.kendalkab.go.id/weblama/#>

3) Website Tahun 2014

Website Kabupaten Kendal mengalami perubahan yang mencolok pada tahun 2014, warna dasar didominasi oleh warna merah dan putih. Penataan menu utama website juga telah tertata rapi secara horizontal, selain itu keberadaan peta Kabupaten Kendal telah tersedia dalam bentuk visual yang jelas, dengan dilengkapi dengan link informasi kecamatan yang berisi tentang data kewilayahan, data kependudukan, data infrastruktur, SPPT PBB, dan data potensi. Perubahan lain adalah website ini telah terintegrasi dengan website radio swara kendal sebagai media penyiaran lokal milik pemerintah Kabupaten Kendal. Pada kolom pemberitaan telah tertata dengan rapi dengan menampilkan berita secara vertikal dilengkapi dengan foto.

Gambar 34

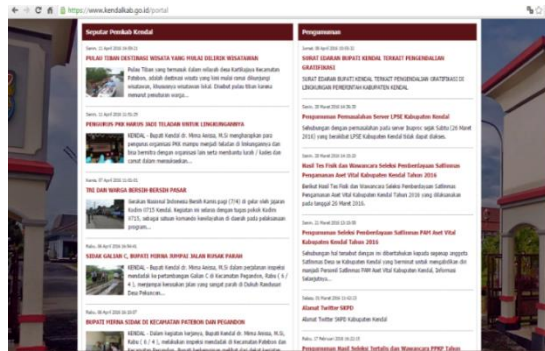
Tampilan bagian atas website pada tahun 2014



Sumber: www.kendalkab.go.id

Gambar 35

Tampilan kolom berita website pada tahun 2014

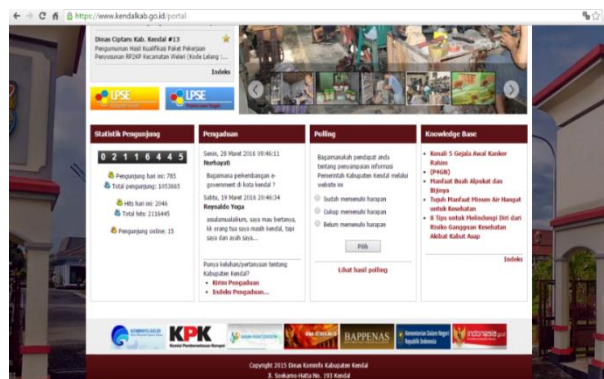


Sumber: www.kendakab.go.id

Pada bagian bawah website mengalami perubahan yang cukup signifikan, dibuktikan dengan adanya empat menu baru yaitu statistik pengunjung, kolom pengaduan, polling kepuasan terhadap informasi yang dimuat melalui website, dan *knowledge base* yang memberikan ilmu pengetahuan umum sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Gambar 36

Tampilan bagian bawah website pada tahun 2014



Sumber: www.kendakab.go.id

4) Website Tahun 2015

Tidak ada perubahan yang menonjol dari segi konten website pada tahun 2015, perbedaan hanya terlihat pada halaman awal ketika membuka website, jika pada tahun sebelumnya tampilan pertama langsung pada beranda website, pada tahun 2015 terdapat gerbang yang mengawali tampilan website dengan menggunakan gambar gapura perbatasan kota Kendal.

Gambar 37

Tampilan awal website pada tahun 2015



Sumber: www.kendalkab.go.id

j. Program Masyarakat dengan Keterbatasan Akses Internet

Internet adalah sebuah media komunikasi belum lama ditemukan jika dibandingkan dengan media-media pendahulunya seperti media cetak dan media elektronik, penggunaan media internet memerlukan sarana dan pengetahuan khusus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2015 sebanyak 952.966 jiwa dan tidak semua penduduk mempunyai akses internet. Belum terdapat data

yang pasti tentang jumlah pengguna internet di Kabupaten Kendal, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola warnet yang ada di wilayah Kabupaten Kendal didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4

Sampel pengguna internet di Kabupaten Kendal

Nama warnet	Rata-rata jumlah pengunjung/hari	Umur rata-rata (Tahun)	Situs yang sering diakses
E-Net	80	15-20	Youtube
G&G Net	70	15-30	Facebook
Prapatan-Net	50	15-20	Game

Sumber: wawancara admin E-Net, G&G Net, dan Prapatan-Net

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Kabupaten Kendal rata-rata adalah pelajar sekolah, akses yang dilakukan terhadap website Kabupaten Kendal hanya kurang dari 10 kali dalam seminggu melalui ketiga website tersebut. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah warnet yang ada di Kabupaten Kendal, namun data tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengunjung website Kabupaten Kendal yang mencapai rata-rata 1500 kunjungan perhari.

Untuk mengatasi keterbatasan akses internet tersebut, maka dibuatlah dua program, berdasarkan wawancara dengan kepala bidang aplikasi dan telematika untuk mempublikasikan tentang kegiatan

pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyiapkan program bagi masyarakat Kendal yang belum memiliki akses internet yaitu:

1) Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

Dalam pemerintah Kabupaten Kendal ada yang namanya FK METRA Forum Komunikasi Media Tradisional, jadi tidak semua masyarakat di Kendal termasuk yang plosok-plosok itu melek internet, yang tidak melek internet itu ada forum komunikasi media tradisional itu, yang menyebarluaskan melalui tarian-tarian dan lain-lain yang diselingi dengan informasi, termasuk salah satu kegiatannya di Kendal Expo. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

FK METRA dilakukan setiap satu tahun sekali pada tanggal 17 agustus bertepatan dengan momen perayaan hari kemerdekaan Indonesia, acara tersebut bertempat di alun-alun Kendal. FK METRA dilakukan dengan cara menyelenggarakan even-even hiburan dan kesenian yang diadakan oleh pemerintah, dalam acara tersebut akan diselingi dengan pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan agar informasi pemerintahan dapat diketahui oleh setiap warga Kendal baik yang berada di dekat dengan pusat pemerintahan maupun jauh dari pusat pemerintahan termasuk bagi mereka yang tidak memahami penggunaan media website. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar seluruh masyarakat Kendal tetap terinformasi seputar kegiatan pemerintahan sebagai salah satu cara untuk membangun daerah.

FK METRA diselenggarakan setiap setahun sekali pada tanggal 17 Agustus tepatnya di alun-alun, acara utamanya adalah hiburan bagi masyarakat Kendal, tapi kita selingi dengan pengumuman-pengumuman. (Abdul Aziz Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi, wawancara tanggal 4 April 2016)

2) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi semakin besar sehingga dibentuklah KIM di Kabupaten Kendal dengan dasar Pergub Nomor 3 tahun 2014. Berdasarkan buku materi bimbingan teknik pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial dalam desa informasi KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Secara lebih spesifik berikut ini adalah peran KIM:

- 1) Fasilitator informasi bagi masyarakat
- 2) Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
- 3) Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat
- 4) Kontrol sosial dalam pembangunan

5) Pelancaran arus informasi

6) Terminal informasi

KIM yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal mendapatkan bimbingan secara langsung oleh Dinas Kominfo dalam kurun waktu sekali dalam setahun. KIM mempunyai enam aktivitas yaitu:

1) Akses Informasi

Melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber baik dari sumber langsung maupun tidak langsung. Sumber langsung adalah dari lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka pendapat dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Sedangkan informasi tidak langsung ialah melalui kelompok cetak dan eletronika termasuk juga internet. Dalam mengakses informasi dilakukan seleksi mana yang penting dan mana yang tidak untuk kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar

2) Diskusi

Setelah mengakses informasi, kemudian dilakukan diskusi bersama anggota KIM untuk menjawab informasi yang berkembang

3) Implementasi

Tahap ini dilakukan setelah dalam tahapan sebelumnya diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperolehnya.

4) Networking

Networking merupakan jaringan KIM yaitu kerjasama atau hubungan yang dikembangkan, baik anatar KIM dengan KIM yang lainnya maupun antara KIM dengan pemengkun kepentingan lainnya, seperti pemerintah, swasta, pers, dunia usaha, perbankan dan lain-lain.

5) Diseminasi informasi

Diseminasi informasi merupakan proses penyebarluasan informasi apabila informasi itu sudah diolah dan diyakini sangat sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

6) Aspirasi

Aspirasi merupakan kegiatan KIM dalam upaya menyerap harapan/ekspektasi masyarakat terkait dengan aktivitas pembangunan di wilayahnya.

Berikut ini adalah Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal:

Tabel 5
Kelompok Informasi Masyarakat

No	Nama KIM	Lokasi
1	KIM Desa Kedungboto	Kec. Limbangan
2	KIM Desa Tegorejo	Kec. Pegandon
3	KIM Desa Damarjati	Kec. Sukorejo
4	KIM Kelurahan Patukangan	Kec. Kota Kendal
5	KIM Kecamatan Cepiring	Kec. Cepiring
6	KIM Desa Kedung Suren	Kec. Kaliwungu Selatan
7	KIM Desa Tejorejo	Kec. Ringinarum
8	KIM Desa Kaliayu	Kec. Cepiring
9	KIM Desa Banyu Urip	Kec. Ngampel
10	KIM Desa Sidomulyo	Kec. Cepiring

Sumber: Dokumen Dinas Kominfo

k. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebarluasan Informasi Melalui Website Kabupaten Kendal

1) Faktor Pendukung

a) Peralatan Memadai

Peralatan yang dibutuhkan dalam penyebarluasan informasi melalui website yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal

telah sesuai dengan kebutuhan, masing-masing SKPD telah difasilitasi dengan unit komputer yang terkoneksi dengan internet sehingga publikasi informasi dapat dilakukan di setiap kantor SKPD. Khusus di kantor bagian hubungan masyarakat khususnya bagian media massa dilengkapi dengan empat unit komputer sebagai penunjang update informasi yang harus terus dilakukan demi menjaga agar masyarakat dapat terus terinformasi dengan kegiatan pemerintahan melalui media yang resmi dan terpercaya.

b) Sumber Daya Manusia Yang Berkompetensi

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh bagian hubungan masyarakat telah mendapatkan pelatihan jurnalistik sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya, selain itu penguasaan terhadap teknologi yang tersedia juga sudah sesuai dengan harapan.

Faktor pendukungnya peralatan kita sudah memadai, kemudian kompetensi SDM kita dari hari ke hari terus kita tingkatkan. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

2) Faktor penghambat

a) Kesadaran SKPD Rendah

Tidak semua SKPD konsisten pada pengelolaan website Kabupaten Kendal, sebagian besar pegawai masih belum menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik, pemerintahan yang transparan dapat ditunjukkan dengan berbagai hal dan salah satunya

adalah pemanfaatan website sebagai media untuk memberikan pengetahuan kepada publik.

Kendalanya yaitu masing-masing SKPD belum memahami bahwa website itu penting sebagai media penyebarluasan informasi, namun kendala-kendala itu kita perbaiki, kita lakukan penyadaran-penyadaran. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

b) PPTIK Belum Berfungsi Dengan Maksimal

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Heri Aryanto selaku kepala seksi telematika, pada setiap SKPD telah ditempatkan pegawai yang bertugas sebagai petugas pembantu teknologi informasi dan komunikasi, yang berperan sebagai pengelola website di masing-masing SKPD. Namun pembagian tugas tersebut tidak berjalan dengan semestinya, ditunjukkan dengan adanya konten yang tidak terisi yang seharusnya menjadi tanggung jawab PPTIK.

c) Respon Lambat

Permohonan informasi yang diajukan kepada pihak pemerintah melalui website tidak mendapat tanggapan yang segera, birokrasi yang berbelit-belit menjadikan permohonan informasi membutuhkan waktu yang panjang hingga akhirnya bisa didapatkan, hal tersebut menjadikan fungsi website menjadi kurang maksimal.

Pertanyaan yang kita kirimkan itu responya kurang cepat, kominfo sudah menindak lanjuti pertanyaan tapi SKPD terkait slow respon. (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

d) Gangguan aliran listrik

Dalam kondisi tertentu website Kabupaten Kendal tidak dapat diakses karena matinya server website. Hal tersebut dikarenakan terputusnya aliran listrik yang berasal dari PLN, sedangkan UPS yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal belum disetting agar otomatis menyala saat listrik PLN padam.

Kalau soal website yang tidak dapat diakses itu memang karena faktor teknis, yaitu karena UPS yang kita miliki belum disetting otomatis menyala ketika listrik yang bersal dari PLN padam, jadi ketika listrik mati maka server website juga mengalami gangguan. (Heri Aryanto, Kepala Seksi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 Maret 2016)

3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Melalui Website Kabupaten Kendal

Peneliti melakukan wawancara kepada Muhammad Arif Prayoga, yang merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Kendal yang menyandang gelar S1 jurusan ilmu sosial. pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan memiliki akses dan pernah mengunjungi website Kabupaten Kendal.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa arif mengetahui website Kabupaten Kendal dari *searching* yang dilakukannya mesin pencari google, alasan mengapa arif membuka website Kabupaten Kendal adalah karena rasa ingin tahunya tentang media publikasi resmi milik pemerintah agar mendapatkan informasi yang terpercaya, dalam beberapa kesempatan membuka website, arif mengatakan bahwa informasi yang paling sering diakses adalah berita seputar kegiatan pemerintahan.

Saya tahu website Kabupaten Kendal dari *searching* di google, alasannya pengen tahu kegiatan pemerintah Kabupaten Kendal itu seperti apa. (Muhammad Arif Prayoga, Masyarakat Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 maret 2016)

Arif mengungkapkan bahwa pemanfaatan website Kabupaten Kendal sebagai media penyebarluasan informasi sudah baik namun belum berfungsi dengan maksimal, hal ini didasari oleh kurangnya pembaruan informasi dalam website terkecuali pemberitaan yang dilakukan oleh bagian humas. Arif juga mengatakan bahwa informasi yang diberikan masih terlalu umum dan kurang spesifik karena masih menggunakan satu domain website, seharusnya setiap SKPD di Kabupaten Kendal memiliki subdomain website sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih terfokus.

Kalo menurut saya sudah baik, tapi belum maksimal karena yang di update cuma berita saja, itupun cuma kegiatan pemerintahan, harusnya setiap instansi punya website jadi informasinya lebih jelas. (Muhammad Arif Prayoga, Masyarakat Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 maret 2016)

Dalam wawancara tersebut juga dibahas tentang adanya kolom pengaduan, arif mengaku tidak mengetahui keberadaan kolom pengaduan dengan alasan letak kolom yang berada di bagian bawah website, namun menurutnya keberadaan kolom pengaduan merupakan fasilitas yang baik guna mengetahui efek pemberitaan bagi masyarakat. Secara garis besar arif menyatakan bahwa penyebaran informasi melalui website pemerintah Kabupaten Kendal belum mencukupi kebutuhan informasi.

Saya malah tidak tahu adanya kolom tersebut. Sebenarnya baik supaya bisa tahu efek pemberitaan di masyarakat. Kalo buat saya website ini belum mencukupi kebutuhan informasi. (Muhammad Arif Prayoga, Masyarakat Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 2 maret 2016)

B. Pembahasan

1. Peran Humas Dalam Penyebarluasan Informasi Melalui Website

Sebagai sebuah instansi yang dimiliki oleh Negara, bagian humas Kabupaten Kendal berorientasi kepada pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Sam Black (Onong, 1992: 39-40) ada empat tujuan utama humas pemerintah daerah, yaitu:

- a. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari.

Humas Kabupaten Kendal turut berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Berbagai jenis media digunakan oleh humas pemerintah baik media cetak, elektronik maupun media baru berupa website. Humas memegang peranan sebagai bagian yang melakukan pembaharuan informasi melalui berita, berdasarkan hal tersebut humas telah melakukan apa yang terkandung dalam poin pertama ini.

- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan.

Sebagai penghubung kepada pihak pemerintah humas dituntut mampu menyediakan saluran bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, dalam website Kabupaten Kendal tersedia

kolom pengaduan yang ditujukan untuk masyarakat agar dapat menyatakan pandangannya berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya pengelolaan kolom pengaduan tersebut tidak dikelola oleh humas, melainkan oleh Dinas Kominfo sebagai penyedia website. Selain itu setiap pemberitaan yang dipublikasikan oleh humas tidak dilengkapi dengan kolom komentar untuk memberikan tanggapan secara langsung, sehingga berita tersebut hanya dapat dibaca tanpa bisa ditanggapi oleh pembaca. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan website ini humas belum mampu menyediakan sarana kepada masyarakat untuk mengemukakan pandangannya.

- c. Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pada website Kabupaten Kendal tidak tersedia informasi yang menunjukkan cara pelaksanaan sistem pemerintahan, tidak ada pula keterangan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penduduk. Berdasarkan data tersebut pemerintah Kabupaten Kendal termasuk bagian humas belum mampu memberikan pelayanan informasi sesuai dengan nilai yang terkandung dalam poin ini.

d. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, belum ada informasi yang secara langsung mengajak masyarakat untuk meningkatkan rasa bangga sebagai warga Negara Indonesia, namun hal tersebut ditunjukkan secara tersirat melalui publikasi kegiatan yang berhubungan dengan hari besar kenegaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Praktek yang terjadi lapangan menunjukkan bahwa mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara menjadi poin yang belum terlalu ditekankan melalui media website ini.

Peranan humas dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, menurut Betty (2012: 9-10) peran humas dibagi dalam empat kategori, yaitu penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Jika dikaitkan dengan pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi, maka hal tersebut relevan dengan peran humas sebagai fasilitator komunikasi. Fasilitator komunikasi berarti bahwa humas berperan sebagai komunikator atau mediator untuk mendengar apa yang dibutuhkan oleh publiknya. Dalam prakteknya humas hanya melakukan publikasi melalui pembaharuan berita tanpa ada tanggapan dari pembaca, hal tersebut berarti bahwa peran humas Kabupaten Kendal belum berjalan sesuai dengan teori ini.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Bonar (1993: 89-91) peran humas sebagai lembaga penerangan informasi harusnya berada dalam “satu bendera”, yang berarti bahwa humas menjadi koordinator penerangan seluruh

lembaga pemerintah. Peran humas Kabupaten Kendal sebagai koordinator penerangan informasi belum berjalan sesuai dengan teori ini, informasi dalam website selain pembaharuan berita tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan humas, secara tidak langsung hal tersebut berbahaya bagi kestabilan pemerintahan, karena tidak semua pengisi konten website mengetahui peraturan jurnalistik.

Aktivitas humas pemerintah adalah bentuk realisasi dari peran dan fungsinya. Cutlip dkk. (2006: 468-479) mengemukakan bahwa terdapat tujuh aktivitas humas pemerintah, yaitu Memberi informasi kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam program pemerintah, membangun dukungan masyarakat, sebagai perantara pemerintah kepada masyarakat, mengelola media elektronik dan partisipasi masyarakat, mengelola informasi internal, dan memfasilitasi hubungan media.

Dari tujuh poin yang diungkapkan oleh Cutlip terdapat dua poin yang berhubungan dengan pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi, yang pertama adalah mengelola media elektronik dan partisipasi masyarakat, peran humas dalam pengelolaan media website sangatlah terbatas, hal tersebut menjadikan aktivitas humas Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Telah terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh humas namun justru dilakukan oleh Dinas Kominfo.

Poin yang kedua adalah memfasilitasi hubungan media, pembaharuan berita yang dilakukan oleh humas juga berfungsi sebagai *press release* bagi

para wartawan, website pemerintah adalah sumber terpercaya yang dimanfaatkan sebagai sumber berita oleh para awak media. Berkat peran para wartawan tersebut pemerintah Kabupaten Kendal dapat mempublikasikan kebijakannya secara lebih luas, hal tersebut juga menjadikan hubungan pemerintah dan wartawan menjadi semakin baik dan menempatkan satu sama lain sebagai mitra, guna mendukung kepentingan masing-masing pihak. Namun wartawan yang terkoordinir oleh humas Kabupaten Kendal hanya terbatas pada wartawan media cetak saja.

Pemilihan media publikasi sangat berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai, hal ini membuat media yang digunakan harus sesuai dengan keadaan khalayak sasaran, Betty (2012: 47-49) menyebutkan ada lima media yang digunakan oleh humas, yaitu surat kabar, majalah, siaran radio, siaran televisi dan *newsletter*. Media publikasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal sudah cukup lengkap, dalam bentuk media cetak terdapat majalah Yakin dan tabloid Gelora, pada media siaran radio ada radio swara Kendal yang berada di bawah manajemen subbagian media massa, pada media audio visual pemerintah juga mengisi acara *talkshow* baik pada media lokal Jawa Tengah maupun media nasional. Media yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal dapat dikatakan lengkap, namun yang perlu menjadi catatan adalah kualitas dan kuantitas informasi yang disampaikan melalui media tersebut yang akan berpengaruh terhadap minat para pembaca, pendengar dan pemirsa sebagai sasaran publikasi.

Dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang berada di masyarakat, maka humas juga melakukan penyesuaian agar tetap mendapatkan perhatian dari publiknya. Penggunaan internet adalah sebuah tuntutan demi menjaga eksistensi humas. Website Kabupaten Kendal merupakan sebuah tindak lanjut dari penerapan undang-undang keterbukaan publik yang menjadi salah satu landasan kegiatan kehumasan.

2. Website Kabupaten Kendal

a. Pengadaan Website Kabupaten Kendal

Website Kabupaten Kendal adalah sebuah bukti nyata perkembangan sarana komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah menjalankan peran sebagai pihak penyedia website melalui seksi Aplikasi dan Telematika dan pengelolaan kontennya melalui seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi. Namun tumpang tindih tugas pokok dan fungsi terjadi ketika pengelolaan konten website juga dirangkap oleh seksi Aplikasi dan telematika, hal ini tentu mengurangi efektifitas kinerja Seksi Aplikasi dan Telematika karena tugas yang dibebankan menjadi lebih banyak. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap bagian dalam setiap SKPD dilakukan berdasarkan proporsi yang telah disesuaikan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, maka dari itu kerberadaan tumpang tindih tugas seharusnya menjadi permasalahan yang sebisa mungkin dihindari.

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, penggunaan website Kabupaten Kendal belum memiliki dasar hukum sebagai sebuah media penyebarluasan informasi publik yang berasal dari pemerintah daerah, selama ini dasar hukum yang digunakan berasal dari pemerintah pusat, yaitu berupa Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri. Instruksi Bupati secara lisan tentu belum menjadi dasar yang kuat bagi setiap jajarannya untuk dapat memaksimalkan pengelolaan website, agar menjadi sebuah saluran komunikasi yang dapat memberikan segala jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika semua informasi dapat diakses melalui website tentu menjadi keuntungan bagi pemerintah karena memangkas biaya dan waktu pengelolaan informasi. Maka dari itu keberadaan sebuah peraturan daerah yang mengatur penggunaan website sebagai media penyebarluasan informasi sangat dibutuhkan untuk memotivasi pegawai pemerintah Kabupaten Kendal dalam penggunaan website.

b. Sasaran dan Tujuan Website Kabupaten Kendal

Salah satu poin yang terdapat dalam tujuan pengdaan website Kabupaten Kendal adalah untuk memperkenalkan potensi di daerah Kabupaten Kendal untuk masyarakat secara luas. Namun pada website Kabupaten Kendal belum terdapat informasi tentang potensi yang dipublikasikan. Informasi potensi yang terdapat di Kendal adalah sebuah poin penting yang seharusnya tersedia, hal ini berkaitan erat dengan

kebutuhan para calon investor yang hendak menanamkan modalnya. Informasi potensi menjadi salah satu informasi yang paling dicari.

Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang sebuah daerah website menjadi salah satu media utamanya. Potensi Kabupaten Kendal sendiri sebenarnya telah dimuat dalam subdomain website milik Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, namun sepatutnya sebagai gambaran pemerintahan dalam dunia maya website Kendal juga menyediakan informasi potensi, guna melengkapi konten website yang telah tersedia.

c. Tim Website Kabupaten Kendal

Pembentukan tim website yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat terealisasinya *electronic government*. Sebagai sebuah sarana komunikasi dengan jumlah pengakses rata-rata 1500 perhari website Kabupaten Kendal adalah sebuah media yang sangat potensial dan masih mungkin untuk terus berkembang, berdasarkan hal tersebut pembentukan sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website merupakan tindakan yang tepat. Susunan tim yang terdiri dari unsur Dinas Kominfo dan humas merupakan sebuah kolaborasi dari dua SKPD yang berkompetensi dalam bidang pengelolaan informasi, dengan harapan segala bentuk informasi dapat dipublikasikan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangan kode etik jurnalistik, karena informasi yang dimuat juga berfungsi sebagai sebuah *press release* yang

akan diteruskan oleh para wartawan melalui media massa. Dengan turut melibatkan pimpinan daerah sebagai penasehat membuat website mempunyai dasar yang kuat sebagai sebuah fasilitas informasi milik daerah, Bupati juga harus turut berpartisipasi dalam pengelolaan website melalui fungsi pengawasan sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tidak melenceng dari tujuannya.

d. Pengisian Konten Website Kabupaten Kendal

Pengisian konten website adalah aktivitas utama pengelolaan website, setiap SKPD Kabupaten Kendal mulai dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Lembaga Pendukung, Kecamatan, Perusahaan Daerah, dan Organisasi diberi kewenangan untuk mengisi konten website sesuai dengan bagiannya masing-masing, konten yang diisikan berupa pembaharuan susunan organisasi yang terjadi dalam SKPD dalam jangka waktu enam bulan sekali. Dalam susunan tim website telah ditentukan pihak mana yang berkompetensi dalam urusan pengelolaan website, yaitu Dinas Kominfo dan humas, maka setiap informasi yang dipublikasikan seharusnya melewati persetujuan dari kedua pihak tersebut, namun pada kenyataannya hal tersebut belum dilakukan. Pengisian konten website masih terpecah dan belum terorganisasi dengan semestinya.

Pelayanan informasi yang baik adalah pelayanan satu pintu sehingga setiap informasi yang keluar masuk dapat terorganisasi dan terdokumentasi secara tertib. Jika semua unsur pemerintahan seperti

sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis, lembaga pendukung, kecamatan, perusahaan daerah, dan organisasi diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian konten maka harus ada pihak yang mengawasi dan mengkoordinasi. Peraturan jurnalistik tentu menjadi unsur yang berlaku dalam informasi website, sedangkan tidak setiap SKPD memahami peraturan tersebut. Website adalah sarana yang dapat diakses oleh setiap orang, baik yang bertanggung jawab maupun tidak. Maka dari itu kesalahan dalam pengisian konten website harus diminimalisasi melalui pemeriksaan oleh pihak yang berkompeten dalam mengolah informasi.

e. Konten Website Kabupaten Kendal

Merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang standar konten website milik instansi pemerintah, website Kabupaten Kendal telah sesuai dengan kriteria tersebut. Konten website pada tahun 2014 hingga 2015 berisikan selayang pandang, pemerintahan daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan/kebijakan daerah dan berita, forum diskusi dan saran/komentar. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2013 terdapat kekurangan dengan belum tersedianya forum diskusi dan komentar. Kesesuaian website Kabupaten Kendal dengan kriteria pemerintah pusat menjadi sebuah nilai plus bagi pengelolaan website, hal ini menandakan profesionalitas pegawai dengan menaati perintah yang diberikan. Namun kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan informasi yang dirasakan oleh masyarakat, selain tunduk pada

perintah pimpinan, tim website Kabupaten Kendal juga mempunyai prioritas untuk mencukupi segala bentuk informasi yang diminta oleh masyarakat diluar informasi yang dikecualikan. Hal ini memungkinkan penambahan isi konten website jika memang diperlukan, karena melengkapi konten website bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibann, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pihak pemerintah kepada publiknya untuk memenuhi apa yang menjadi haknya.

f. SOP Pengisian Konten Website Kabupaten Kendal

Penyusunan SOP website Kabupaten Kendal dilakukan agar setiap kegiatan pengisian konten website berjalan dengan peraturan yang berlaku. SOP disusun oleh Dinas Kominfo dan dibagikan kepada SKPD yang melakukan pengisian konten website. Dalam SOP Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 01/TELE/KOMINFO/2013 menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh humas dalam mengisi konten website yaitu pengumpulan materi, koreksi materi oleh kepala subbagian, persetujuan dari kepala bagian, pengolahan data, mengupload berita dan mendokumentasikan setiap berita. Tidak semua prosedur tersebut dilakukan oleh humas, pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh kepala subbagian dan kepala bagian humas tidak dilakukan demi mempersingkat pengelolaan berita.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan kompetensi para pegawai humas dalam melakukan pengolahan informasi memang sudah

tidak diragukan lagi, namun ada tahapan yang sengaja dihilangkan sehingga proses pengelolaan informasi berita tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena apa yang didapatkan oleh pegawai belum tentu sesuai dengan harapan kepala bagian dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahpahaman antara kepala bagian humas dengan para pegawainya.

g. Kolom Pengaduan Website Kabupaten Kendal

Keberadaan Undang-Undang KIP menjadi jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan, harapannya dengan adanya dasar hukum tersebut akan ada partisipasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dirasa penting karena masyarakat merupakan elemen yang akan merasakan dampak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Secara spesifik keterbukaan informasi publik yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dibuktikan dengan adanya kolom pengaduan sebagai salah satu fitur pelengkap website. Fasilitas ini disediakan untuk menunjang kemudahan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan fakta di lapangan, keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kolom pengaduan

dalam website pemerintah, Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara maka didapatkan hasil analisis tentang penyebab minimnya partisipasi masyarakat melalui kolom pengaduan, analisisnya adalah sebagai berikut:

1) Letak Kolom Pengaduan Website Kabupaten Kendal

Mayoritas pengunjung website membuka portal Kabupaten Kendal untuk mencari informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kolom pembaruan informasi berada di bagian atas website. Hal tersebut membuat konten website yang berada di bagian bawah website menjadi kurang diperhatikan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak terlepas dari kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung. Website adalah sebuah sarana komunikasi yang bukan hanya berfungsi sebagai media publikasi semata, website telah bertransformasi menjadi media penampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga diperlukan tata letak yang tepat guna memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada.

2) Persyaratan Pengisian Pesan Pengaduan

Pengiriman pesan aduan memang tidak dapat serta merta langsung dikirim kepada pihak pemerintah, terlebih dahulu pengirim harus mengisi persyaratan yang telah ditentukan seperti, nama pengadu, nomor kartu tanda penduduk, email, alamat, dan nomor telepon. Tidak

semua pengunjung website mempunyai akun email, sehingga akan mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kolom pengaduan ini. Padahal dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

3) Respon Lambat Pemerintah Terhadap Pengaduan Masyarakat

Normalnya sebagai media yang tidak terpengaruh ruang dan waktu website mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, namun dalam prakteknya tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan masyarakat melalui website tidak dapat direspon dengan seketika, hal tersebut dikarenakan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan jenis pengaduan tidak berjalan dengan baik, proses olah data dan birokrasi yang panjang turut berpengaruh terhadap jawaban dari setiap keluhan yang dikirimkan.

Menurut Betty (2012: 65-66) ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh humas dengan menggunakan internet, yaitu publikasi, *media relations*, dan mencari informasi yang *up to date*. Ketiga hal tersebut telah dilakukan oleh humas Kabupaten Kendal, dengan memaksimalkan fasilitas yang ada maka pemerintah akan semakin mudah untuk dijangkau oleh publiknya, guna mendapatkan dukungan dari mereka terhadap rencana yang akan dilakukan. Namun upaya tersebut juga bergantung pada antusiasme

masyarakat dalam mengakses informasi yang telah disediakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya program pemerintah melalui internet, dan lebih spesifik menggunakan fasilitas website sebagai sebuah sarana yang dapat memuat konten audio visual. Namun bagian humas tidak turut serta dalam pengelolaan teknis website.

Website akan bermanfaat dengan baik jika semua fungsinya berjalan dengan normal, Louis K. Falk memberikan enam poin untuk pengelolaan website yang baik, diantaranya:

1) Setiap link yang ditawarkan harus *online (no dead links)*

Semua link yang berada dalam website Kabupaten Kendal dalam keadaan online dan dapat berfungsi secara normal, namun terkadang website tersebut tidak bisa dibuka yang dikarenakan aliran listrik padam dan menyebabkan server *offline*, sedangkan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) belum disetting aktif secara otomatis jika listrik PLN mati secara tiba-tiba. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena seharusnya website bisa dibuka kapanpun tanpa terbatas oleh waktu.

2) Tersedia kontak informasi (*contact information*)

Semua kontak instansi telah tersedia dalam masing-masing link SKPD, ketersediaan kontak informasi adalah sebuah keharusan yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui media website.

3) Penataan penempatan informasi (*Placement of Information*)

Kecenderungan manusia membaca dari kiri kekanan membuat objek yang berada di sebelah kiri akan lebih mudah dilihat, hal ini telah diterapkan pada website Kabupaten Kendal. Kolom berita yang menjadi menu utama ditempatkan pada bagian kiri tengah sehingga dapat menarik perhatian pengunjung website.

4) Pewarnaan (*Use of Color*) website Kabupaten Kendal

Pewarnaan pada website Kabupaten Kendal dengan menonjolkan warna merah dan putih dipilih karena kedua warna tersebut terlihat kontras, sehingga memperjelas konten yang ada dalam website, warna tersebut juga tidak mengganggu upaya membaca informasi oleh pengunjung.

5) Kemudahan dalam penggunaan website Kabupaten Kendal

Posisi menu dalam website telah ditata dengan rapi dan jelas, link dan subdomain website juga dapat dibuka tanpa gangguan yang berarti, hal ini menunjukkan profesionalitas pemerintah sebagai pengelola.

6) Penggunaan website mempunyai tujuan

Website yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal masuk dalam jenis *information model* yaitu website yang didesain sebagai sarana memuat materi pesan dan informasi bagi masyarakat maupun pers. Tampilan

website masih terlihat monoton sehingga kurang menarik dari segi visual

Menurut Anna (2014: 146-148) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menentukan standar konten minimal yang harus dimiliki, website pemerintah yang baik adalah website dengan isi informasi meliputi Selayang Pandang, Pemerintahan Daerah, Geografi, Peta Wilayah dan Sumber Daya, Peraturan/Kebijakan Daerah dan Berita, Forum Diskusi dan Saran/Komentar.

Website pemerintah Kabupaten Kendal telah hampir memenuhi kriteria seperti yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan satu kekurangan, yaitu tidak tersedianya informasi tentang sumber daya yang ada di Kendal. Sumber daya adalah sebuah faktor penting guna mendukung perekonomian daerah, maka dari itu diperlukan penambahan informasi tentang sumber daya agar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Rapat Koordinasi Website Kabupaten Kendal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rapat yang diselenggarakan dalam rangka pengelolaan website hanya dilaksanakan pada masing-masing SKPD yang menjadi pengurus tim website, rapat Dinas Kominfo dan humas dilakukan secara terpisah. Pada setiap pihak pengisi konten website telah ditetapkan petugas PPTIK, dan dalam kurun waktu enam bulan sekali seluruh petugas PPTIK beserta pimpinannya

diundang dalam sebuah rapat koordinasi. Permasalahan terjadi ketika dalam rapat tersebut pimpinan instansi tidak memenuhi undangan dengan alasan bahwa pihaknya telah mengirimkan wakil untuk menghadiri rapat tersebut. Ketidakhadiran pimpinan instansi tersebut secara langsung akan menghambat koordinasi dalam penyebarluasan informasi melalui website. Hal ini juga menjadi sebuah bukti bahwa belum semua pihak pengisi konten website memahami bahwa website adalah sebuah media komunikasi yang penting.

i. Perbedaan Website Kabupaten Kendal pada Tahun 2012 Hingga 2015

Berdasarkan hasil perlombaan Anugerah Media Humas tahun 2012 Kabupaten Kendal dinyatakan sebagai pemenang kategori pelayanan informasi melalui media website, hal tersebut menjadi indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengelola sebuah portal yang dimiliki oleh daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa kesuksesan meraih gelar juara perlombaan AMH tersebut dikarenakan kesesuaian website Kabupaten Kendal dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait syarat situs website pemerintah yang baik. Dari sisi desain website Kabupaten Kendal pada tahun 2012 telah sesuai dengan apa yang ditentukan, salah satu buktinya adalah dengan menempatkan foto pimpinan dan wakil pimpinan daerah yang diletakkan di bagian atas website, selain itu tata letak menu website telah tertata walaupun belum serapi penataan pada tahun 2015. Kebermanfaatan website juga telah

berjalan dengan baik yaitu dengan pembaharuan informasi berkala yang mempunyai manfaat mengedukasi masyarakat tentang kegiatan pemerintahan. Pada sisi interaktivitas komunikasi website Kabupaten Kendal telah terintegrasi dengan website lembaga pemerintahan nasional maupun daerah seperti portal Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik.Republik Indonesia, Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa Tengah dan Kendal. Sedangkan tingkat interaktivitas website Kabupaten Kendal masih terbatas pada komunikasi satu arah melalui informasi yang belum bisa ditanggapi pengunjung website secara langsung.

Namun yang menjadi poin penting adalah dengan adanya ketidakpuasan pengunjung website terhadap informasi yang dipublikasikan melalui website pada tahun 2015, selain itu ketersediaan kolom pengaduan juga belum mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Hal ini menjadi sebuah kekurangan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Pada tahun 2014 website Kabupaten Kendal mengalami perubahan yang sangat signifikan, berdasarkan hasil pengamatan terdapat menu tambahan dan pembaharuan tata letaknya. Hal tersebut membuat website secara desain tidak sesuai dengan kriteria yang di tetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun secara konten menjadi

lebih lengkap, termasuk dengan adanya kolom pengaduan yang hingga tahun 2015 belum berfungsi sesuai dengan harapan.

Adanya permasalahan yang terdapat dalam website Kabupaten Kendal secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan *e Government*, pengaplikasian perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan adalah sebagai upaya untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, jika salah satu elemen *e Government* mengalami permasalahan maka juga akan berpengaruh terhadap elemen yang lain. Maka dari itu permasalahan yang ada harus diatasi dengan segera untuk membangun sebuah pelayanan informasi yang terintegrasi dengan penggunaan yang mudah dan biaya yang murah.

j. Program Masyarakat dengan Keterbatasan Akses Internet

Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kegiatan yang dirancang sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, keterbatasan sebagian masyarakat Kabupaten Kendal dalam mengakses internet melatarbelakangi kedua kegiatan ini, perbedaannya FK METRA adalah program yang bersal dari pemerintah, sedangkan KIM adalah sebuah forum yang terdapat dalam masyarakat yang kemudian mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak pemerintah. FK METRA dilaksanakan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan kesenian sebagai mediana dengan menyelipkan pemberian informasi ditengah kegiatan. Namun FK

METRA hanya dilakukan di beberapa tempat yang menjadi pusat keramaian, sehingga masyarakat yang berada di luar daerah tersebut tidak terjangkau. KIM juga mengalami permasalahan yang serupa, dari total 20 kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kendal hanya terdapat 10 KIM, selain itu belum ada sosialisasi yang mampu menggugah keingintahuan masyarakat tentang keberadaan kedua kegiatan tersebut. Munculnya permasalahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas publikasi informasi yang berdampak pada tidak meratanya penyebaran informasi publik.

k. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebarluasan Informasi Melalui Website Kabupaten Kendal

Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang terlatih dan didukung dengan peralatan yang memadai maka seharusnya pemanfaatan website sebagai media penyebaran informasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cepat dan tepat, namun terkadang permasalahan terletak pada diri pribadi masing-masing pegawai. Budaya menunda-nunda pekerjaan masih menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi, hal tersebut dikarenakan banyaknya tugas yang harus dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga membuat fokus terpecah. Namun sebagai pihak pelayan masyarakat tentu hal tersebut harus dikesampingkan demi menunjukkan profesionalitas sebagai Aparatur Sipil Negara. Ketersediaan fasilitas akan terasa percuma jika perubahan kearah yang lebih baik belum ditumbuhkan dalam diri masing-masing pegawai

pemerintahan. Faktor penghambat adalah sebuah hal yang pasti ada, tinggal bagaimana cara masing-masing individu maupun sebagai kelompok dalam mengatasi hal tersebut.

3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Melalui Website Kabupaten Kendal

Indikator berhasil atau tidaknya sebuah program pemerintah, tergantung dari tanggapan atau respon yang diberikan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh pelayanan, hal ini juga berlaku untuk mengukur seberapa efektif website pemerintah Kabupaten Kendal sebagai media penyebarluasan informasi publik. Dari sudut pandang pemerintah pengelolaan website sudah dikatakan sesuai prosedur, namun bukti yang sesungguhnya berada pada tanggapan masyarakat yang memanfaatkan website untuk mengetahui berita seputar pemerintahan. Dari data yang diperoleh dari informan yang menjadi pengguna website, dapat diketahui bahwa website Kabupaten Kendal masih mempunyai kekurangan yang perlu diperbaiki, pemerintah seharusnya tidak hanya berfikir bahwa pelaksanaan pengelolaan website hanya sekadar menjalankan tugas, namun harus menyadari bahwa fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar ditunjukkan, dengan menyesuaikan keinginan dari masyarakat. Pemerintah harus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan website milik Kabupaten Kendal berfungsi dengan maksimal.